

ABSTRACT

POLICY ADVOCACY OF COASTAL WOMEN'S NETWORK (JPrP) IN DEVELOPMENT WATER FRONT CITY (WFC)

By

IRMA PUSPITASARI

Policy advocacy effort at its core is the process of balancing between the needs and interests of both parties involved in public policy that government and society. Because public policy is not enough just to be seen from one of interest that is, the government's need for community participation by providing space to accommodate the various interest that exist in society, so that policies can be implemented participatory because not only coming from one direction in the government, but also from community.

Formulation of the problem in this research is how policy advocacy undertaken by the Coastal Women's Network (JPrP) in the construction of Water Front City (WFC) and do the government apply the participial development planing on development in the devolepment of Water Front City (WFC). The purpose of this research is to determine policy advocacy undertaken by the Coastal Women's Network (JPrP) in the construction of Water Front City (WFC) and for knowing the government apply the participial development planing on development in the devolepment of Water Front City (WFC).

The research method used in this research is descriptive method with qualitative approaches. The sources of data derived from primary and secondary data. The step used in data collection are depth interview, observation, and interpreting. Technical analyses of data were using data reduction, data presentation and data verification.

The result of this research was concudet by the advocacy of Coastal Women's Network (JPrP) in the dvelopment of Water Front City (WFC) has not been able to work effectively. Several stages of advocacy does not run optimally effected goal od advocacy can not be achieved properly. Policies can not be perceived participatory arrangements in the draft coastal zone, Water Front City (WFC). It can be seen from participation of cosiety, policy cosialitation and civil society empowering which done in planning process of Water Front City (WFC) development.

Keyword : public policy, policy advocacy, participation development

ABSTRAK

ADVOKASI KEBIJAKAN JARINGAN PEREMPUAN PESISIR (JPrP) DALAM PEMBANGUNAN *WATER FRONT CITY (WFC)*

Oleh

IRMA PUSPITASARI

Upaya advokasi kebijakan pada intinya adalah proses penyeimbangan antara kebutuhan dan kepentingan kedua pihak yang terkait dalam kebijakan publik yaitu pemerintah dan masyarakat. Karena kebijakan publik tidak cukup hanya dilihat dari satu kepentingan yaitu, pemerintah namun perlu adanya keikutsertaan masyarakat dengan menyediakan ruang untuk mengakomodasi berbagai kepentingan yang ada di masyarakat, sehingga kebijakan yang dilaksanakan dapat bersifat partisipatif karena tidak hanya bersumber dari satu arah yaitu pemerintah, tetapi juga dari masyarakat.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana advokasi kebijakan yang dilakukan oleh Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) dalam pembangunan *Water Front City (WFC)* dan apakah pemerintah menerapkan perencanaan pembangunan partisipatif dalam pembangunan *Water Front City (WFC)*

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui advokasi kebijakan yang dilakukan oleh Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) dalam pembangunan *Water Front City (WFC)* dan untuk mengetahui apakah pemerintah menerapkan perencanaan pembangunan partisipatif dalam pembangunan *Water Front City (WFC)*

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer dan data sekunder. Langkah-langkah yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Teknik pengolahan data yang digunakan adalah inventarisasi, editing dan interpretasi. Teknis analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

Hasil penelitian ini adalah advokasi kebijakan yang dilakukan oleh Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) dalam pembangunan *Water Front City (WFC)* belum dapat berjalan secara efektif. Beberapa tahapan advokasi tidak dijalankan secara optimal mengakibatkan tujuan dari advokasi belum dapat tercapai secara baik. Kebijakan yang bersifat partisipatif juga belum dapat dirasakan dalam konsep penataan kawasan pesisir, *Water Front City (WFC)*, hal tersebut dapat dilihat dari partisipasi masyarakat, sosialisasi kebijakan dan penguatan kelembagaan masyarakat yang dilakukan dalam proses perencanaan pembangunan *Water Front City (WFC)*.

Kata kunci : kebijakan publik, advokasi kebijakan, pembangunan partisipatif

